Pola Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat saat Pandemi COVID-19

Household Consumption Pattern in Cities and Regencies of West Kalimantan Province during COVID-19 Pandemic

Ulfa Mardiyah^{1*}

¹BPS Provinsi Kalimantan Barat,
Jl. Sutan Syahrir No. 24/42 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

*Penulis korespondensi. *e-mail*: ulfa.mardiyah@bps.go.id
(Diterima: 31 Januari 2022; Disetujui: 24 Februari 2022)

ABSTRACT

West Kalimantan's economy contracted as deep as 1.82 percent in 2020. This is due a global pandemic, is disease caused by the COVID-19 virus. As economic growth contracted, household consumption expenditure also contracted by 0.21 percent. The contraction of public consumption expenditure will have an impact on the level of community welfare. This research, apart from studying food and non-food consumption patterns in urban and rural areas, will also determine the relationship between poverty and people's food consumption patterns in West Kalimantan. The analytical method used is descriptive analysis and Spearman rank correlation coefficient analysis is used to determine the relationship between the average per capita food expenditure and the poverty level. The result of this study is that food consumption expenditure in urban areas tends to be lower than in rural areas. Meanwhile, the results of the Spearman rank correlation analysis show a positive relationship between the average per capita food expenditure and the poverty rate in West Kalimantan in 2021.

Keywords: per capita consumption expenditure, poverty rate, spearman rank correlation

ABSTRAK

Perekonomian Kalimantan Barat mengalami kontraksi sedalam 1,82 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi global yaitu wabah penyakit virus COVID-19. Seiring terkontraksinya pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 juga terkontraksi sedalam 0,21 persen. Terkontraksinya pengeluaran konsumsi masyarakat ini dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini, selain untuk mempelajari pola konsumsi rumah tangga menurut makanan dan non makanan di perdesaan dan perkotaan, juga untuk mengetahui adanya korelasi tingkat kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran konsumsi menurut makanan per kapita di Kalimantan Barat. Analisis deskriptif dengan menyertakan koefisien korelasi rank spearman digunakan dalam penelitian ini, untuk mengetahui korelasi tingkat kemiskinan dan rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita. Hasil penelitian ini yaitu, rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Sedangkan koefisien korelasi rank spearman menghasilkan adanya korelasi positif yang kuat pada tingkat kemiskinan dan rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita di Kalimantan Barat Tahun 2021.

Kata kunci: pengeluaran konsumsi per kapita, tingkat kemiskinan, korelasi *rank spearman*

PENDAHULUAN

Perekonomian Kalimantan Barat sejak Maret 2020 telah mengalami titik yang paling rendah setelah krisis 1998 dan krisis 2008. Pencapaian pertumbuhan ekonomi selama tahun 2016 sampai dengan 2019 yang selalu berada dalam angka diatas 5 persen telah mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020, yaitu pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar 1,82 persen. Penyebab dari kontraksinya pertumbuhan ekonomi adalah adanya pandemi global yaitu wabah penyakit virus COVID-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi maka laju pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,21 persen. Meski tidak terlalu dalam, namun sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Mengingat bahwa komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat, yaitu sebesar 51,63 persen.

Menurut Abdillah, J.J, dkk (2019) konsumsi sangat berperan penting dan memberikan kontribusi yang cukup besar pada stabilitas ekonomi. Apabila tingkat konsumsi masyarakat semakin tinggi, maka perubahan perekonomian di suatu daerah juga akan semakin tinggi.

Konsumsi selalu berhubungan dengan masyarakat dalam kesehariannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Konsumsi akan selalu dibutuhkan dari sejak lahir ke dunia hingga akhirnya meninggal dunia, sehingga setiap penduduk akan melakukan aktivitas konsumsi selama hidupnya. Menurut Dumairy (1996), pengertian konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun rumah tangga untuk membelanjakan sebagian besar pendapatannya dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan Mankiw (2000) menyatakan bahwa "konsumsi merupakan rumah tangga yang membeli barang atau jasa, barang yang dimaksud terdiri dari barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang yang tidak tahan lama yaitu barang yang habis pakai, seperti makanan. Sedangkan barang tahan lama adalah barang yang tidak habis sekali pakai, seperti mobil, alat elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jasa yang merupakan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti berobat ke dokter..

Pola pengeluaran masing-masing rumah tangga akan selalu berbeda dan tidak sama persis. Karena masing-masing rumah tangga akan mempunyai kebutuhan prioritas yang berbeda. Misalnya suatu rumah tangga yang berpenghasilan rendah akan lebih memprioritaskan kebutuhannya untuk makanan, karena untuk membeli non makanan akan merasa kekurangan. Sedangkan orang yang berpenghasilan tinggi akan cenderung mengkonsumsi lebih banyak non makanan daripada non makanan, misalnya pengeluaran suatu rumah tangga tersebut akan lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan anak, baik dalam bentuk kursus atau sebagainya yang menunjang pendidikan anak yang lebih baik.

Menurut Deaton dan Muellbauer (1980), jika tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara semakin tinggi, maka proporsi pengeluaran konsumsi makanan penduduk tersebut akan semakin rendah, dan sebaliknya. Sehingga pola konsumsi rumah tangga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi jika rumah tangga lebih banyak mengonsumsi kebutuhan non makanan dari pada kebutuhan makanan. Sedangkan kesejahteraan masyarakat akan semakin rendah jika rumah tangga tersebut lebih banyak mengonsumsi kebutuhan makanan dari pada non makanan. Kesejahteraan rumah tangga yang rendah bisa dikaitkan dengan masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga termasuk rumah tangga yang miskin.

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya mempelajari pola konsumsi rumah tangga menurut makanan dan non makanan di wilayah perdesaan dan perkotaan, selain itu juga perlu mengetahui hubungan antara tingkat kemiskinan dan rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita di

Kalimantan Barat agar pemerintah lebih tepat sasaran dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 dan Maret 2021 yang dilaksanakan oleh BPS. Unit analisis dalam penelitian ini, yaitu tingkat kemiskinan dan rata-rata pengeluaran makanan per kapita di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum pola konsumsi rumah tangga menurut kabupaten/kota se Kalimantan Barat serta didukung dengan analisis korelasi *rank spearman* untuk mengetahui korelasi antara tingkat kemiskinan dan rata-rata pengeluaran makanan per kapita. Berikut rumusnya:

$$\rho = 1 - \frac{6 \cdot \sum d_i^2}{n(n^2-1)} \quad (1)$$

Dimana:

ρ : nilai korelasi *rank spearman*

d^2 : selisih *rank* data

n : jumlah data

Metode ini tidak perlu diasumsikan bahwa populasi yang diselidiki harus berdistribusi normal dan populasi sampel yang digunakan sebagai sampel berjumlah $5 < n < 30$. Sehingga metode korelasi *rank spearman* ini sesuai dengan tujuan analisis yang di bahas pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Konsumsi rumah tangga dalam Susenas dibagi menjadi kelompok makanan dan bukan makanan sehingga dengan menggunakan data tersebut dapat mengetahui pola konsumsi rumah tangga. Dalam keadaan pendapatan yang cukup terbatas, pemenuhan kebutuhan pangan akan menjadi hal yang utama. Namun ketika pendapatan terjadi peningkatan, maka secara bertahap juga akan terjadi pergeseran pada pola konsumsi rumah tangga, yaitu peningkatan jumlah pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan non-makanan dan penurunan jumlah pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan makanan.

Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran Per kapita dan Persentasenya menurut Wilayah dan Kelompok Makanan di Kalimantan Barat, 2020-2021

	Perdesaan		Perkotaan	
	Makanan (1)	Non Makanan (2)	Makanan (3)	Non Makanan (4)
2020				
Rata-rata Pengeluaran (Rp/Per kapita/Bulan)	539.487,37	412.227,88	666.983,27	778.369,30
Persentase (%)	56,69	43,31	46,15	53,85
2021				
Rata-rata Pengeluaran (Rp/Per kapita/Bulan)	556.660,71	441.583,31	685.868,25	769.054,64
Persentase (%)	55,76	44,24	47,14	52,86

Sumber: BPS (2021), diolah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa di Kalimantan Barat proporsi rata-rata pengeluaran untuk makanan di wilayah perkotaan lebih rendah dibanding wilayah perdesaan. Sebaliknya, proporsi rata-rata pengeluaran non-makanan lebih rendah di wilayah perdesaan daripada di wilayah perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah perkotaan memiliki kecenderungan kebutuhan sekunder/tersier (non-makanan) yang lebih tinggi daripada daerah perdesaan.

Di Kalimantan Barat selama tahun 2020-2021, di daerah perdesaan terjadi perubahan proporsi konsumsi masyarakat yaitu proporsi masyarakat yang mengkonsumsi makanan di tahun 2021 lebih rendah dari pada tahun 2020, namun perubahannya hanya sekitar 1 persen, yaitu dari 56,69 persen menjadi 55,76 persen. Padahal pada tahun 2021 masih pandemi yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan sebagian masyarakat lebih menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan primer, namun ternyata tidak ada perubahan yang signifikan antara perilaku konsumsi masyarakat selama dua tahun terakhir ini.

Sedangkan di daerah perkotaan dari tahun 2020-2021 berkebalikan dengan daerah perdesaan. Di perkotaan terjadi perubahan proporsi konsumsi makanan masyarakat ditahun 2021 lebih tinggi dari pada tahun 2020, yaitu dari 46,15 persen menjadi 47,14 persen. Perubahan ini tidak terlalu signifikan, namun dapat kita lihat bahwa di tengah pandemi, masyarakat perkotaan lebih banyak mengkonsumsi makanan. Hal itu karena pemikiran masyarakat kota yang lebih maju bahwa mengkonsumsi makanan ketika pandemi sangat diperlukan untuk menjaga imunitas tubuh.

Tabel 2. Rata-rata Pengeluaran Per kapita sebulan menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan dan Persentasenya di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, 2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita	Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sambas	976.476	55,86	44,14
Bengkayang	964.862	55,37	44,63
Landak	889.628	55,27	44,73
Mempawah	953.957	54,87	45,13
Sanggau	998.933	53,60	46,40
Ketapang	1.085.449	56,19	43,81
Sintang	1.096.775	52,10	47,90
Kapuas Hulu	1.042.002	52,61	47,39
Sekadau	1.070.112	55,84	44,16
Melawi	1.064.941	53,45	46,55
Kayong Utara	1.129.072	53,57	46,43
Kubu Raya	1.015.328	52,59	47,41
Kota Pontianak	1.690.667	44,31	55,69
Kota Singkawang	1.518.233	47,15	52,85

Sumber: BPS (2021), diolah.

Selama tahun 2020-2021, perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi makanan lebih rendah dari pada bukan makanan terjadi di wilayah perkotaan yang rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan hanya 44 hingga 47 persen tepatnya di Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Pada Tabel 2 dapat dilihat, bahwa untuk rata-rata pengeluaran per kapita di Kalimantan Barat tahun 2020 berkisar antara 880.000 rupiah sampai dengan 1.700.000 rupiah. Rata-rata pengeluaran paling rendah terjadi di Kabupaten Landak dengan nilai sebesar 889,63 ribu rupiah per kapita/bulan, dengan proporsi pengeluaran makanan sebesar 55,27 persen dan sisanya untuk pengeluaran non

makanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Landak lebih banyak mengkonsumsi kebutuhan pangan (primer) dari pada kebutuhan sekunder/tersier. Sedangkan rata-rata pengeluaran tertinggi tentunya terjadi di wilayah perkotaan, yaitu Kota Pontianak sebesar 1,69 juta rupiah per kapita/bulan dengan proporsi terbesar yaitu pengeluaran non makanan sebesar 55,69 persen dan sisanya untuk pengeluaran makanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Pontianak lebih sejahtera dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian A Massaid, M. Hanif, D. Febrianti, dan N.Chamida (2019) yang menyatakan bahwa, semakin besar pengeluaran untuk konsumsi non makanan maka tingkat kemiskinannya semakin menurun. Sehingga apabila tingkat kemiskinan rendah, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak akan naik.

Semua kabupaten di Kalimantan Barat tahun 2020, pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih tinggi dari pada pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Sedangkan daerah yang sudah berstatus kota, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih rendah dibanding pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Sesuai dengan teori ekonomi bahwa berdasarkan tipologi wilayah akan terdapat perbedaan pada pola konsumsi di wilayah perkotaan dan pola konsumsi wilayah perdesaan, dikuatkan dengan hasil penelitian Nursiah Chalid (2010) yang menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan yang lebih rendah daripada proporsi pengeluaran untuk konsumsi non makanan maka tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik.

Tabel 3. Rata-rata Pengeluaran Per kapita sebulan dan Persentasenya menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita	Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sambas	955.140	53,92	46,08
Bengkayang	1.080.574	53,84	46,16
Landak	1.033.792	55,23	44,77
Mempawah	941.823	54,04	45,96
Sanggau	1.190.047	52,27	47,73
Ketapang	1.185.059	55,05	44,95
Sintang	1.071.319	56,25	43,75
Kapuas Hulu	1.041.714	53,42	46,58
Sekadau	999.316	58,28	41,72
Melawi	1.131.020	54,50	45,50
Kayong Utara	1.145.792	54,36	45,64
Kubu Raya	983.319	51,25	48,75
Kota Pontianak	1.694.618	44,15	55,85
Kota Singkawang	1.548.685	47,86	52,14

Sumber: BPS (2021), diolah.

Pada Tahun 2021 menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan di wilayah Kalimantan Barat, sehingga rata-rata pengeluaran per kapita berkisar menjadi diantara 940.000 rupiah sampai dengan 1.700.000 rupiah. Batas Pengeluaran per kapita yang paling rendah pada tahun 2020, yaitu 889,63 ribu rupiah menjadi 941,82 ribu rupiah di tahun 2021 yang terjadi di Kabupaten Mempawah. Sehingga Kabupaten Landak yang menjadi daerah terendah rata-rata pengeluarannya di tahun 2020, sekarang mengalami kenaikan menjadi 1,033 juta rupiah. Namun demikian, proporsi pengeluaran makanan dan non makanan masih belum ada perubahan secara signifikan.

Kabupaten Mempawah rata-rata pengeluaran per kapita mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021, yaitu sebesar 953,96 ribu rupiah menjadi 941,82 ribu rupiah, dan proporsi pengeluaran makanan dan non makanan juga masih belum ada perubahan yang signifikan, yaitu proporsi pengeluaran makanan sekitar 54 persen dan sisanya untuk pengeluaran non makanan. Namun dibandingkan dengan Kabupaten Landak, maka proporsi pengeluaran makanan sedikit lebih rendah dan pengeluaran non makanan lebih tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Mempawah sedikit lebih sejahtera dibanding masyarakat Landak. Hal ini disebabkan oleh wilayah Kabupaten Mempawah yang lebih dekat dengan pusat perekonomian di ibu kota provinsi Kalimantan Barat dari pada wilayah Kabupaten Landak, sehingga cenderung lebih besar pengeluaran untuk non makanan. Menurut Armanini Rambe, Hartoyo dan Emmy S Karsin (2008), besarnya pengeluaran dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan keluarga. Keluarga yang mempunyai proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih banyak dapat disebut keluarga dengan kesejahteraan yang lebih baik.

Sama halnya dengan tahun 2020 bahwa semua kabupaten di Kalimantan Barat tahun 2021, pengeluaran untuk makanan masih lebih tinggi banding dengan pengeluaran untuk non makanan. Sedangkan daerah yang sudah berstatus Kota, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang pengeluaran untuk makanan lebih rendah banding dengan pengeluaran untuk non makanan. Menurut Data Susenas 2021, di wilayah perkotaan Sebagian besar pengeluaran non makanan digunakan untuk kebutuhan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga yaitu sekitar 52 sampai dengan 55 persen, kemudian digunakan untuk belanja Aneka Barang dan Jasa sekitar 21 sampai dengan 27 persen dan sisanya untuk kebutuhan Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala; Barang Tahan Lama; Pajak, Pungutan, dan Asuransi; serta Keperluan Pesta dan Upacara. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aulia Rezky dan Sofyan Syahrur (2017) bahwa pola konsumsi masyarakat urban (perkotaan) relatif lebih besar untuk non makanan dibandingkan makanan.

Analisis Korelasi *Separman*

Dari data tingkat kemiskinan tahun 2021, terlihat bahwa Kabupaten Melawi, Landak, dan Ketapang merupakan tiga wilayah dengan kemiskinan paling tinggi di Kalimantan Barat, sekitar 10 sampai dengan 12 persen. Sementara itu, Kabupaten Kuburaya, Sanggau dan Kota Pontianak menjadi tiga kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Barat yaitu sekitar 4,3 sampai dengan 4,6 persen. Kabupaten Kubu Raya dengan tingkat kemiskinan terendah memiliki persentase rata-rata pengeluaran makanan sebesar 51,25 persen, yang merupakan persentase rata-rata pengeluaran makanan tertinggi ketiga setelah Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Tabel 3. Tingkat Kemiskinan dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per kapita menurut Kelompok Makanan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan	Persentase Rata-rata pengeluaran Per kapita menurut Makanan
(1)	(2)	(3)
Sambas	7,66	53,92
Bengkayang	6,48	53,84
Landak	10,99	55,23
Mempawah	5,18	54,04
Sanggau	4,55	52,27
Ketapang	10,13	55,05
Sintang	9,28	56,25
Kapuas Hulu	8,93	53,42
Sekadau	6,26	58,28
Melawi	12,01	54,50

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan	Persentase Rata-rata pengeluaran Per kapita menurut Makanan
(1)	(2)	(3)
Kayong Utara	9,33	54,36
Kubu Raya	4,34	51,25
Kota Pontianak	4,58	44,15
Kota Singkawang	4,83	47,86

Sumber: BPS (2021), diolah.

Sedangkan tingkat kemiskinan paling tinggi terjadi di Kabupaten Melawi dengan persentase rata-rata pengeluaran makanan sebesar 54,50 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Melawi lebih banyak mengeluarkan konsumsi makanan daripada pengeluaran non makanan.

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi Rank Spearman

Correlations			TK_MISKIN	PERSEN_MAKANAN
Spearman's rho	TK_MISKIN	Correlation Coefficient	1.000	.697**
		Sig. (2-tailed)	.	.006
		N	14	14
	PERSEN_MAKANAN	Correlation Coefficient	.697**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.006	.
		N	14	14

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat kemiskinan dan persentase rata-rata pengeluaran menurut makanan per kapita dengan hasil *p-value* sebesar 0,006 karena menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (*sig* < 0,05). Korelasi tersebut bersifat kuat karena hasil dari koefisien korelasinya sebesar 0,697. Hubungan akan semakin kuat jika angka koefisien korelasi mendekati angka 1. Sedangkan arah korelasi dapat dilihat dari hasil angka koefisien korelasi yang berada dalam rentang -1 sampai dengan 1. Dengan demikian, dari hasil korelasi diatas terdapat hubungan positif antara tingkat kemiskinan dan persentase rata-rata pengeluaran menurut makanan per kapita.

Penelitian yang dilakukan oleh J.J Abdillah, V.H. Wiyono dan B.R. Samudro (2019) tentang analisis dan pola konsumsi dan kemiskinan di Jawa Tengah, juga memperoleh hasil uji koefisien korelasi spearman bahwa terdapat hubungan antara proporsi penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita populasi. Semakin tinggi konsumsi suatu daerah, maka semakin sejahtera penduduk didaerah tersebut atau semakin tinggi pendapatan masyarakat disaerah tersebut.

G.A. Nina dan S.D. Rustariyuni (2020) juga melakukan penelitian tentang“determinan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali”yang menghasilkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi non makanan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hasil korelasi diatas bahwa persentase rata-rata pengeluaran makanan per kapita mempunyai hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021. Sehingga, semakin tinggi persentase rata-rata pengeluaran makanan per kapita maka tingkat kemiskinan juga akan semakin naik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis penelitian yang telah dilakukan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata pengeluaran penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran rumah tangga di wilayahperdesaan. Proporsi konsumsi kelompok makanan di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi kelompok non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki kecenderungan kebutuhan sekunder/tersier yang lebih tinggi daripada daerah perdesaan.
2. Pada tahun 2021 menunjukkan adanya perubahan rata-rata pengeluaran per kapita terendah yang cukup signifikan dari 889,63 ribu rupiah menjadi 941,82 ribu rupiah. Berarti di masa pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi rata-rata pengeluaran per kapita suatu daerah karena justru pengeluaran penduduk cenderung semakin bertambah.
3. Hasil uji koefisien korelasi “rank spearman”menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara rata-rata pengeluaran menurut makanan per kapita dengan tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rata-rata pengeluaran menurut makanan per kapita suatu daerah, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan semakin tinggi pula.

Saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu berdasarkan pola konsumsi khususnya di wilayah perdesaan dapat dijadikan prioritas dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J.J., Wiyono, V.H., & Samudro, B.R. (2019). Analysis of Consumption Pattern and Poverty in Central Java. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol. 6 Issue 3, Hal: 1043-1054.
- Akpan, Patrick L., dkk. (2010). Consumption pattern and rate of proverty in Developing Countries: Evidence from Nigeria. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper*. No. 58906.
- Aulia Rezky, M. & Syahnur, S. (2017). Konsumsi Masyarakat Urban di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*. Vol.2 No.2, Hal: 285-296.
- Bustamam, N., dkk. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*. Vol. 32, No.1, Hal: 85-92
- Chalid, N. (2010). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Daerah Riau. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 18 No.1, Hal: 28-40.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Erlangga.
- Lestari, A.O.A.W. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap terhadap Perilaku Cuci Tangan pada Masyarakat Kelurahan Pegirian. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*. Vol. 7 No. 1, Hal: 1-11.
- Martin, A., dkk. (2020). Sosio-Economic Impact of Covid-19 on Household Consumption and Proverty. *Economics of Disasters and Climate Change 4*. Hal:453 – 479.
- Massaid, A., dkk. (2019). Modelling of Poverty Percentage of Non-Food Per Capita Expenditures in Indonesia Using Least Square Spline Estimator. *The Electrochemical Society*.
- Nina, G.A. (2020). Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*. Vol. 9 No.1, Hal: 24-36.
- Sari, N.A. (2016). Analisis Pola Konsumsi Pangan Daerah Perkotaan dan Perdesaan Serta Keterkaitannya dengan Karakteristik Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia*. Vol.16 No. 2, Hal: 69-81.
- Subarna, T. (2012). Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non Pangan Penduduk Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 4 No. 4, Hal: 243-250.